

PENGALAMAN EMPIRIS MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN CIAMIS¹

Oleh : Ir. Endang Supardi²

PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pembangunan pertanian secara terencana dan terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kualitas konsumsi gizi, mendorong/menciptakan kesempatan kerja serta mendorong peningkatan pertumbuhan industri pertanian melalui pengembangan agribisnis atau agroidustri yang berkesinambungan secara sistematis untuk menuju Ketahanan Pangan daerah dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Kabupaten Ciamis telah membagi 3 Wilayah Sub Pengembangan Pembangunan Pertanian yaitu :

1. Sub Wilayah Pembangunan Ciamis Utara (Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Kawali, Cipaku, Cijeungjing, Sadananya dan Sukadana) diarahkan kepada pertanian Lahan Sawah, Lahan Kering, Unggas, Ternak Kecil dan Perikanan Darat yang dititik beratkan kepada konservasi.
2. Sub Wilayah Pembangunan Ciamis Tengah (Cisaga, Purwaharja, Banjar, Pataruman, Langensari, Pamarican, Langkaplancar, Banjarsari, Lakbok, Padaherang, Cimaragas, dan Cidolog) diarahkan kepada pertanian Lahan Sawah, Lahan Kering, Ternak Kecil dan Unggas.

¹ Disampaikan pada acara Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi, 2-3 Oktober 2001, Ruang Serbaguna I, Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong.

² Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

3. Sub Wilayah Pembangunan Ciamis Selatan (Kalipucang, Pangandaran, Cijulang, Sidamulih, Parigi, Cigugur dan Cimerak) diarahkan kepada Pertanian Lahan Sawah, Ternak Besar dan Penangkapan yang dititik beratkan kepada Pariwisata.

Luas areal Kabupaten Ciamis adalah 255.910 ha yang terdiri dari Lahan Kering seluas 198.362 ha, Lahan Sawah seluas 55.001 ha dan Kolam seluas 2.547 ha. Jumlah penduduk sebanyak 1.599.064 orang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 618.798 orang (38,70 %) yang sudah tergabung kedalam 2.533 kelompok tani yang tersebar di 360 Desa dari 34 Kecamatan yang dibina oleh 292 PPL. Kelembagaan yang mendukung program Ketahanan Pangan adalah : KUD 49 buah, Koptan 134 buah dan 5 Bank penyalur kredit program, 32 Poultry Shop dengan jumlah peternak 4.228 orang,

Kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Ciamis setiap tahun khususnya untuk komoditas padi (beras) Surplus sebanyak 135.250 ton beras, komoditas ternak ayam ras surplus 4.939,6 ton dan untuk komoditas kelapa (kopra) surplus 44.772,48 ton/tahun dan gula kelapa 9.334 ton/tahun sedangkan untuk komoditas lainnya masih mendatangkan dari luar kabupaten.

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah tanggal 26 Februari 2001 dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ciamis No. 50 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tanggal 27 Februari 2001, adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan Ketahanan Pangan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan kelembagaan pengelolaan pangan dan penganekaragaman pangan dan gizi.
2. Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan kerawanan pangan.

3. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian kewaspadaan pangan dan gizi.
4. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi.
5. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan dilantik oleh Bupati Ciamis pada tanggal 6 Maret 2001, untuk melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 orang Kepala Seksi (Seksi Ketersediaan dan Kelambagaan Pangan, Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Pangan) yang dilantik pada tanggal 12 Maret 2001.

Komoditas yang merupakan sasaran pengkajian dan pengembangan Ketahanan Pangan untuk konsumsi masyarakat adalah beras, jagung, kedelai, gula merah, kopra (minyak kelapa), daging sapi, daging ayam, telur, ubi kayu, ubi jalar, ikan dan sayuran.

Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis Kantor Ketahanan Pangan sebagai suatu Unit Organisasi Pemerintah Daerah mempunyai visi "*Terwujudnya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, Masyarakat dan Daerah melalui Kegiatan Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berwawasan Agribisnis 2010*".

Dalam pencapaian visi tersebut didukung dengan melaksanakan misi-misi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien yang merupakan modal dasar produksi dan penyediaan pangan melalui upaya-upaya koordinasi.
2. Optimalisasi kelembagaan pangan di pedesaan untuk mendukung ketersediaan pangan.
3. Meningkatkan koordinasi sistem distribusi dan pemasaran yang efektif dan efisien untuk mendukung sistem agribisnis di Kabupaten Ciamis.
4. Meningkatkan koordinasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan baik dalam rangka peningkatan mutu gizi makanan rakyat maupun pengembangan komoditas/pola konsumsi dengan spesifik lokal.

Mengingat Kantor Ketahanan Pangan baru melaksanakan tugas efektifnya 6 bulan, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Referensi mengenai Ketahanan Pangan masih terbatas.
2. Pengertian tentang Ketahanan Pangan baik oleh aparat maupun masyarakat masih kurang dipahami dan masih beranggapan bahwa pangan identik dengan komoditas tanaman pangan.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik di Tingkat Lapangan maupun Kabupaten.
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
5. Sulitnya menghimpun data dari Tingkat Lapangan maupun Kabupaten.
6. Kepala Kantor Ketahanan Pangan harus mengkoordinir para Kepala Dinas yang mempunyai eselon lebih tinggi.
7. Walaupun petugas Ketahanan Pangan di tingkat Kecamatan sudah ada tetapi belum efektif mengingat terbatasnya sarana dan prasarana.
8. Anggaran yang bersumber dari APBN (Bimas Intensifikasi Ketahanan Pangan dan Dana Pendampingan SPFS) dana yang turun tidak sesuai dengan program yang disusun mengingat Bagpro ada di Propinsi dan Kabupaten hanya sebagai PUMK.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Ketahanan Pangan mengupayakan / mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi baik kepada aparat maupun masyarakat di setiap ada kesempatan.
2. Untuk mengatasi sulitnya pelaporan dan mengkoordinasikan yang eselonnya lebih tinggi memanfaatkan Forum Dewan Bimas Ketahanan Pangan dan melaksanakan silaturahmi baik secara formal maupun informal.

3. Mencari dan mengupayakan referensi Ketahanan Pangan baik ke tingkat Pusat maupun ke Dinas/Instansi terkait.
4. Setiap Kepala Seksi melaksanakan expose 1bulan sekali diikuti seluruh staf Ketahanan Pangan dan pertemuan rutin yang dilaksanakan 3 bulan 1 kali dengan petugas Ketahanan Pangan di tingkat Kecamatan.
5. Mengupayakan memasukan anggaran melalui APBD II dan mengusulkan ke Tingkat Pusat.

Hasil yang dicapai selama 6 bulan berdirinya Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya renstra Ketahanan Pangan yang merupakan acuan program kerja Kantor Ketahanan Pangan.
2. Menganalisis data ketersediaan / Ketahanan Pangan di Kecamatan yang dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali (Triwulan).
3. Membuat Peta Ketahanan Pangan.
4. Hasil analisis peta dan data yang sudah disusun oleh Kantor Ketahanan Pangan dibahas bersama dalam Forum Dewan Bimas Ketahanan Pangan.
5. Rekomendasi / Kesepakatan bersama Dewan Bimas Ketahanan Pangan tentang kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis yang dijadikan acuan oleh Dinas/Instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah kebijakan.
6. Terinventarisirnya lembaga Ketahanan Pangan (lumbung sejahtera baik yang dikelola oleh kelompok tani, masyarakat maupun RT/RW).
7. Diperoleh data bahwa pada bulan Januari, Mei, Juni, Oktober dan Nopember di beberapa Kecamatan produksi padi minus $\pm 8.989,41$ ton.
8. Terjalinnnya koordinasi yang lebih baik dengan Sub Dolog baik dalam rangka pengadaan pangan maupun droping beras murah selalu melibatkan Kantor Ketahanan Pangan.

Untuk mensukseskan program Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain:

- **Dari Masyarakat**

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan mendapat dukungan baik dari Tokoh Masyarakat, KTNA, LSM dan Organisasi Profesi kemasyarakatan dan respon masyarakat sangat tinggi.

- **Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

1. Penyediaan pengairan/penyediaan air baku bagi pertanian.
2. Upaya pengembangan SDM baik aparat maupun petani melalui pelatihan dan penyuluhan.
3. Penguatan Modal.
4. Pengembangan/penyediaan benih.
5. Peningkatan kualitas prasarana/sarana transportasi.
6. Penguatan kelembagaan Pemerintah yang khusus mengenai pangan.
7. Dukungan dana dari APBD.

Dukungan Pusat terhadap Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sangat tinggi dalam bentuk program yang diturunkan untuk Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Program Bimas Intensifikasi Ketahanan Pangan.
2. Program Pemberdayaan Kelompok Tani di Pedesaan untuk 14 Kelompok Tani Tanaman Pangan dan 3 Kelompok Tani yang mengelola Lumbung.
3. Program SPFS yang bekerjasama dengan FAO yang dialokasikan di Kecamatan Langensari sebagai pilot project.

Manfaat Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas selama efektif 6 bulan telah dirasakan manfaatnya baik oleh penentu kebijakan maupun masyarakat, antara lain :

Bagi Pemerintah Daerah

1. Sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dalam penanggulangan masalah pangan dan gizi antara lain :
 - Menentukan daerah-daerah yang perlu diberi prioritas tinggi.
 - Menentukan daerah-daerah yang perlu diambil untuk mencegah dan menanggulangi ancaman krisis pangan dan gizi.
2. Mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.

Bagi Pengelola Program

1. Menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan perkembangan dan situasi yang ada.
2. Memantau pelaksanaan kegiatan setiap saat.
3. Mengarahkan Program dan Koordinasi lintas sektoral.
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Program.

Bagi Masyarakat:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.
2. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan.
3. Meningkatkan keterampilan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya penyediaan pangan dan pengembangan agribisnis serta kemitraan usahatani.

Untuk lebih mensukseskan program Ketahanan Pangan khususnya di Jawa Barat maupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia kami menyarankan agar :

1. Di tingkat Propinsi harus ada Badan/Kantor/Dinas yang mengurus Ketahanan Pangan sehingga apabila muncul permasalahan di tingkat Kabupaten tidak selalu ke Pusat tapi bisa diselesaikan di tingkat Propinsi.
2. Untuk mendukung Program Ketahanan Pangan baik di tingkat Kabupaten maupun Propinsi perlu dibentuk Kantor/Badan/Dinas yang mengelola Ketahanan Pangan.
3. Sosialisasi dari Tingkat Pusat dalam hal ini Badan Bimas Ketahanan Pangan Deptan RI agar dilaksanakan terus menerus dan nyata sehingga baik Gubernur maupun Bupati/Walikota merasa perlu adanya Kantor / Badan / Dinas yang mengelola Ketahanan Pangan.
4. Anggaran tidak melalui Propinsi tetapi langsung Bagpro di tingkat Kabupaten sehingga kucuran dana bisa disesuaikan dengan program yang sudah disusun.